

Bank Dunia: Kenaikan TDL Tak Pengaruh Industri

Efisiensi PLN
bisa menghemat
Rp 28 triliun.

JAKARTA — Bank Dunia menilai usulan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen tahun depan tak akan berpengaruh banyak pada industri manufaktur. “Kenaikan 15 persen hanya menaikkan biaya produksi 1 persen,” kata ekonom senior Bank Dunia, Enrique Blanco Armas, di Jakarta kemarin.

Dia memaparkan, beban tagihan listrik menyumbang 5 persen dari keseluruhan ongkos perusahaan manufaktur menengah dan atas. Besarnya beban ini sedikit lebih tinggi pada industri produk mineral non-metallik, seperti semen (11,9 persen), tekstil (7,4 persen), dan elektronik (6,2 persen).

Data Bank Dunia menunjukkan, tarif listrik Indonesia termasuk terendah dari 16 negara yang disurvei mereka. Sejak 2003, tarif listrik rumah tangga bertahan pada US\$ 0,06 per kilowatt jam. Pada periode yang sama, tarif listrik industri sekitar US\$ 0,06 per kilowatt jam sebelum akhirnya naik menjadi

US\$ 0,08 per kilowatt jam pada pertengahan 2010.

Atas pertimbangan itu, Armas menilai langkah menaikkan tarif listrik adalah hal yang wajar. Dengan menaikkan tarif, pemerintah dapat menghemat subsidi listrik, yang menjadi beban berat bagi anggaran. “Subsidi listrik menghabiskan 5 persen dari keseluruhan belanja,” tuturnya.

Meski kenaikan tarif pada Juli lalu tak menyentuh 87 persen sektor rumah tangga, tingginya inflasi Agustus disumbang oleh kenaikan tarif listrik sebesar 0,35 persen. Hal itu justru mengejutkan Bank Dunia karena, menurut hitungan mereka, beban listrik hanya berkontribusi 0,3 persen dari belanja rumah tangga.

Pertengahan Agustus lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan kenaikan tarif listrik sebesar 15 persen tahun depan untuk mengurangi beban subsidi energi. Namun Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat menghapus rencana tersebut.

Anggota Komisi Energi, Satya W. Yudha, mendesak

pemerintah agar satu suara soal kenaikan tarif listrik. Sebab, sebelumnya Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan masih ada kemungkinan tarif listrik naik pada 2011. “Kita minta pemerintah konsisten,” katanya.

Padahal, Satya menegaskan, Dewan tetap pada keputusan awal: tidak menaikkan tarif listrik pada 2011. Kalau tarif tetap dinaikkan, berarti pemerintah melanggar hak konstitusi Dewan. “Pemerintah tak bisa serta-merta menaikkan TDL. Harus menghargai hak konstitusi DPR,” ujarnya.

Ekonom dari Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menjelaskan, pemerintah tak perlu menaikkan tarif bila mampu melakukan efisiensi subsidi untuk PT PLN (Persero). Selama ini PLN lebih banyak memakai solar sebagai bahan bakar pembangkit.

Padahal terdapat bahan bakar lain yang jauh lebih murah namun belum dimanfaatkan, seperti gas atau batu bara. Dengan efisiensi itu, Imam memperkirakan pemerintah dapat menghemat Rp 28 triliun dari operasional PLN. ● ANTON WILLIAM | DANANG WIBOWO

Kuota BBM Naik 1 Juta Kiloliter, Anggaran Tambah Rp 1,9 Triliun

JAKARTA — Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tubagus Haryono menyatakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi akan menambah anggaran. “Kalau kami tidak berbuat apa-apa, akan terjadi *over* kuota. Ingat, 1 juta kiloliter mengakibatkan penambahan hingga Rp 1,9 triliun,” katanya kemarin.

Untuk itu, kata Tubagus, pihaknya akan tetap menjalankan program penataan penyaluran bahan bakar bersubsidi. Tujuannya agar konsumsi bahan bakar tak melebihi kuota yang ditetapkan anggaran 2010. Dia menambahkan, tahun ini akan ada penambahan kuota sekitar 3 juta kiloliter untuk mencukupi kebutuhan konsumsi.

Penataan penyaluran, kata

Tubagus, akan tetap dilakukan karena konsumsi telah melebihi 7,2 persen. “Normalnya konsumsi Premium sebulan mencapai 1,8 juta kiloliter dan solar 1,04 juta kiloliter. Sekarang rata-rata sudah naik hingga 7,24 persen dari keadaan normal,” paparnya.

Tubagus menjelaskan, penataan yang dilakukan antara lain penataan tangki timbun, penambahan bahan bakar nonsubsidi, dan penyediaan infrastruktur di pompa bensin Pertamina.

Selama dilakukan penataan, kata dia, tak akan ada pemotongan bahan bakar bersubsidi kepada masyarakat. “Pembatasan atau pemotongan harus ada landasan hukumnya, tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Juru bicara Pertamina, Mochamad Harun, menyatakan sudah memperbanyak stok bahan bakar nonsubsidi jika pemerintah melakukan pembatasan. “Kami sedang menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah. Apa pun keputusannya, kami siap melaksanakan,” katanya.

Menurut dia, pembatasan bahan bakar subsidi tak bisa langsung diterapkan serentak di Indonesia karena alasan infrastruktur. Harun menambahkan, cara yang dilakukan bertahap. Misalnya di wilayah DKI Jakarta, kemudian berkembang ke seluruh Jawa dan merambat ke Bali. “Paling tidak untuk Jawa-Bali sudah kami siapkan karena infrastrukturnya sudah ada,” katanya.

● GUSTIDHA BUDIARTIE | DANANG WIBOWO



Perluasan Terminal Priok

Petugas melintas di depan mobil *completely built up* siap impor di Tanjung Priok Car Terminal, Jakarta, kemarin. Terminal melakukan penambahan lapangan seluas 2,5 hektare menjadi total 12 hektare untuk mengatasi penumpukan kargo.

JICA Diminta Selesaikan Proyek MRT

JAKARTA — Wakil Presiden Boediono meminta Japan International Corporation Agency (JICA) mempercepat pembangunan transportasi cepat massal (*mass rapid transit/MRT*) untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Hal ini muncul setelah Jakarta diprediksi mengalami kemacetan total pada 2012.

Juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengungkapkan, diskusi secara spesifik soal MRT terjadi antara Boediono dan Senior Vice President JICA Kenzo Oshima kemarin. Boediono menekankan perlunya percepatan pembangunan MRT, yang merupakan satu dari 17 instruksi mengatasi kemacetan.

Kenzo dalam pertemuan itu, kata Yopie, menjelaskan bahwa pembangunan MRT

sudah memasuki tahap rancangan teknis dan akan dilanjutkan ke konstruksi fisik. Menurut JICA, pembangunan MRT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana pembangunan MRT tahap I Lebak Bulus-Bundaran HI akan diparalelkan dengan tahap II ekstensinya, yaitu Bundaran HI-Kota. Sebelumnya, JICA mengisyaratkan menyetujui besaran anggaran pinjaman proyek pembangunan MRT tahap II rute Bundaran HI-Kampung Bandan, yang mencapai Rp 10 triliun.

JICA bahkan telah mengirimkan dokumen hasil evaluasi pinjaman kepada PT MRT Jakarta, yang berisi kesepakatan dari beberapa perubahan di tahap II sebagai upaya realisasi operasional

MRT pada 2018. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan desain rute. Semula proyek MRT tahap I mengambil rute Lebak Bulus-Dukuh Atas, dilanjutkan ke tahap II dengan rute Dukuh Atas-Kampung Bandan.

Namun, karena pertimbangan letak Stasiun Dukuh Atas yang sudah sangat ramai, rute berubah menjadi Lebak Bulus-Bundaran HI dan dilanjutkan Bundaran HI-Kampung Bandan. Akibat perubahan rute tersebut, PT MRT Jakarta harus menambah 900 meter rute stasiun bawah tanah, yang otomatis akan mempengaruhi perubahan biaya pembangunan fisik. Artinya, besar pinjaman dari pihak JICA kepada MRT Indonesia pun bakal berubah.

● EKO ARI WIBOWO

PENGUMUMAN SELEKSI UMUM

Nomor : 005/ 876 /U LP – Sekret/2010

- Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan ini mengundang Penyedia Jasa Konsultan untuk mengikuti seleksi Umum Dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi (Upgrade Aplikasi Simpatda Berbasis Web)	Rp. 335.520.000,-

- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi :
Hari / Tanggal : Rabu – Selasa / 29 September s.d 12 Oktober 2010
Jam : 09.00 s.d 15.00 Wib
Tempat : Sekretariat ULP Jl. Jend. A. Yani No. 16 Muara Enim

- Pengembalian Dokumen Kualifikasi :
Hari / Tanggal : Kamis – Rabu / 30 September s.d 13 Oktober 2010
Jam : 09.00 s.d 15.00 Wib
Tempat : Sekretariat ULP Jl. Jend. A. Yani No. 16 Muara Enim

- Untuk lebih jelas dapat dilihat pada papan pengumuman di Sekretariat ULP.

Muara Enim, 29 September 2010
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Muara Enim